



Newsletter **Pusdatin** Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

VOLUME 12 NO 121

BULAN FEBRUARI 2015

Tim Redaksi :

Pelindung :

Ir. M. Tassim Billah, MSc

Penasehat :

Agus Sunarya, SE, MM

Ir. Leli Nuryati, MSc

Ir. Bayu Mulyana, MM

Ir. Dewa Ngakan Cakrabawa, MM

Penanggung Jawab :

Subagyo, SE

Redaksi :

Dedi Triyono

Editor :

Eko Nugroho, S.Kom, MM

Dra. P.Hanny Muliandy, MM

Dian Prasetyorini, SE

Sri Wahyuningsih, S.Si

Redaktur Pelaksana :

Evita Wahyu Puspitasari, S.Kom

Sekretariat :

Marwati

Agus

Suparmi

Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk Newsletter Pusdatin

Kirimkan ke alamat redaksi :
Pusat Data dan Sistem Informasi
Pertanian

Jl. Harsono RM No. 3

Gd. D Lantai IV

Pasar Minggu – Jakarta 12550

Telp : 021-7805305, 7816384

Fax : 021-7822638

e-mail :

newsletter@pertanian.go.id

Daftar Isi :

- Kunjungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Ke Pusdatin...(1)
- Workshop Penataan dan Analisis Data Lahan Pertanian...(3)
- Workshop Analisis Kesejahteraan Petani 2014...(8)
- Evaluasi Triwulan IV Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian...(11)

KUNJUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU KE PUSDATIN



Tim e-Form Peternakan

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau berkunjung ke Pusdatin pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014. Kunjungan tersebut bersama Sekretaris Distannak Prov. Riau (Yusfar, SH, MH), Kepala Subbag Perencanaan Program Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau (Ir. Daslina, MM), beberapa staf dari Dinas Pertanian dan Peternakan dan petugas dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Kepala Bidang Data Komoditas (Dr. Ir. Leli Nuryati, MSc) dan Fungsional Statistisi Bidang Data Komoditas menyambut kedatangan tamu dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau.

Dinas Pertanian dan Peternakan adalah dalam upaya membangun sub sektor peternakan, diperlukan data dan informasi yang tersedia secara terus menerus dan *up to date*, untuk itu diperlukan suatu metodologi pengambilan data statistik yang tepat mulai dari proses pengumpulan, pengolahan data, analisis sampai kepada penyajiannya. Salah satu penyajian data peternakan yang telah dilaksanakan diantaranya melalui pelaporan e-Form Peternakan yaitu suatu metode penyampaian data dan informasi peternakan berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi - aplikasi yang telah dirancang sehingga data dari Kabupaten/Kota bisa langsung diakses oleh Pusat. Aplikasi e-Form Peternakan dikembangkan oleh Pusdatin

Maksud dan tujuan kunjungan ini

Lanjutan Berita Kunjungan Distanak Ke Pusdatin...



Suasana Kunjungan Distanak Provinsi Riau Ke Pusdatin

sejak tahun 2008. Provinsi Riau telah diperkenalkan dengan Aplikasi e-Form Peternakan pada tahun 2009. Bimbingan teknis juga terus dilakukan pada tahun 2010, 2011 dan 2014. Hasil pelaporan e-Form Peternakan dari Provinsi Riau cukup baik walaupun belum semua Kabupaten/Kota di Provinsi Riau melakukan pengiriman data ke Pusat.

Saya mencoba membuat evaluasi mengenai pengiriman data e-Form Peternakan yang sudah masuk ke Server Pusat pada tahun 2014 dan permasalahan yang ada di Provinsi Riau terkait dengan aplikasi e-Form Peternakan. Berdasarkan hasil evaluasi pengiriman data ke server Pusat adalah :

1. Kelengkapan data Formulir NAK 01 (Populasi Ternak 2013) pada tahun 2014 dari 12 Kabupaten/Kota hanya 1 Kabupaten/Kota saja yang tidak aktif dalam pengiriman data ke aplikasi e-Form Peternakan yaitu Kab.Rokan Hilir.
2. Kelengkapan data Formulir NAK 02 (Pemotongan Ternak) pada tahun 2014 dari 12 Kabupaten/Kota hanya 4 Kabupaten/Kota saja yang aktif dalam pengiriman data ke aplikasi e-Form Peternakan yaitu Kab. Kuantan Singingi, Siak, Kampar dan Kota Pekanbaru.
3. Kelengkapan data Formulir NAK 03 (Pemasukan

Ternak) pada tahun 2014 dari 12 Kabupaten/Kota hanya 4 Kabupaten/Kota saja yang aktif dalam pengiriman data ke aplikasi e-Form Peternakan yaitu Kab.Kuantan Singingi, Siak, Kampar dan Kota Pekanbaru.

4. Kelengkapan data Formulir NAK 04 (Pengeluaran Ternak) pada tahun 2014 dari 12 Kabupaten/Kota hanya 2 Kabupaten/Kota saja yang aktif dalam pengiriman data ke aplikasi e-Form Peternakan yaitu Kab.Kuantan Singingi, dan Kampar.

Dari hasil evaluasi ini terlihat ada 2 Kabupaten di provinsi Riau yang sangat aktif dalam pengiriman data ke server Pusat, yaitu Kab. Kuantan Singingi dan Kab. Kampar. Diharapkan kinerja dari kedua petugas kabupaten ini dapat di ikuti oleh 10 petugas Kabupaten/Kota Provinsi Riau agar dapat peternakan di Provinsi Riau terupdate dengan baik.

Setelah dilakukan diskusi dengan petugas Kabupaten/Kota diketahui penyebab semakin berkurangnya laporan e-Form Peternakan dari Kabupaten/Kota, ternyata disebabkan karena permasalahan yang terjadi di lapangan salah satunya adalah sampai saat ini belum dapat mengirimkan data karena format laporan Kabupaten/Kota untuk tiap Kecamatan berbeda dengan format e-Form Peternakan sehingga harus menyesuaikan format dengan mengolah data Kecamatan terlebih dahulu sedangkan SDM yang ada di daerah sangat terbatas sehingga tidak ada waktu untuk mengolah data tersebut. Selain itu pergantian SDM yang mengelola data dan informasi juga berpengaruh terhadap keberlanjutan laporan yang disampaikan. Terlepas dari permasalahan diatas, perlu kita sadari bahwa sistem informasi yang sudah dibangun perlu dikoordinasikan dan disosialisasikan baik bagi pengguna maupun instansi terkait. Pengembangan sistem informasi tentu saja tidak terlepas dari

Lanjutan Berita Kunjungan Distanak Ke Pusdatin...

pengembangan *software*, penyediaan *hardware*, penyiapan SDM dan penyusunan prosedur rutinitas sistem sehari - hari.

Saran dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau adalah Pusdatin diharapkan mengembangkan Aplikasi e-Form Peternakan sampai tingkat Kecamatan agar aliran data lebih cepat di update oleh petugas Kecamatan. Database diharapkan sampai level desa. Bulan Februari ini Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau berencana memberikan fasilitas komputer ke petugas Kecamatan, diharapkan komputer yang diberikan ini sudah terinstall Aplikasi e-Form

Peternakan tingkat Kecamatan.

Tanggapan dari Pusdatin adalah akan disampaikan kepada pimpinan mengenai saran tersebut. Tapi untuk sejauh ini database yang ada di Aplikasi e-Form Peternakan sudah sampai tingkat Desa, tetapi yang database yang di tampilkan sampai tingkat kecamatan saja.

Diharapkan setelah kunjungan ini petugas dapat melakukan pengelolaan data dan informasi peternakan mulai dari pengumpulan data, pengolahan data sampai menyajikan data tersebut menjadi informasi peternakan yang cepat, tepat dan akurat. (Suyati)

WORKSHOP PENATAAN DAN ANALISIS DATA LAHAN PERTANIAN



Pembukaan Workshop Penataan dan Analisis Data Lahan Pertanian

Bagi bangsa Indonesia ketersediaan lahan merupakan faktor penting untuk menjamin kelangsungan penyediaan pangan dan tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi lain diluar sektor pertanian. Terjadinya pertambahan penduduk rata - rata 1.38 persen per tahun dan perkembangan ekonomi akan senantiasa mempengaruhi sisi permintaan terhadap lahan yang luasnya bersifat tetap. Oleh karenanya permasalahan alokasi penggunaan dan penguasaan lahan akan menjadi persoalan strategis untuk dapat diselesaikan agar

dicapai struktur penggunaan lahan terbaik dan distribusi penguasaan lahan yang adil sejalan dengan visi dan misi kehidupan kebangsaan.

Berlangsungnya alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah menjadi non pertanian yang makin meningkat berdampak terhadap kemampuan dalam memproduksi pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. Data menunjukkan bahwa dinamika perubahan penggunaan lahan sawah menjadi semakin intensif dengan semakin berkembangnya perekonomian wilayah. Banyak kalangan berpendapat bahwa permasalahan ini tidak terlepas dari proses transformasi struktur ekonomi yang terjadi di Indonesia yakni dari yang berbasiskan sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industri, jasa dan perdagangan). Sebagai suatu konsekuensi pembangunan, hal ini dapat dinilai wajar. Pertumbuhan penduduk kota dan aktivitas

Lanjutan Berita Workshop Penataan dan Analisis...



Narasumber Workshop Penataan dan Analisis Data Lahan Pertanian

perekonomian akan memerlukan lahan untuk perumahan, industri, sarana dan prasarana penunjang lainnya. Mengingat perbedaan yang tajam antara "rent" sektor pertanian dengan "rent" sektor non pertanian, maka perubahan lahan pertanian ke sektor non pertanian praktis sulit dihindari.

Luas penggunaan lahan sawah di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 8,11 juta hektar yang tersebar di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 46%. Luas lahan sawah di Pulau Sumatera sebesar 27,64%, Pulau Kalimantan sebesar 13,16%, Pulau Sulawesi sebesar 12,26%, sementara wilayah Maluku dan Irian lahan sawah hanya sekitar 0,31% dan 0,63% terhadap total lahan sawah di Indonesia.

Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013 dari BPS, selama 10 tahun terakhir (2003-2013), rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian mengalami peningkatan dari 0,35 ha menjadi 0,86 ha. Sedangkan luas lahan sawah yang dikuasai rumah tangga pertanian juga meningkat dari 0,10 ha menjadi 0,19 ha.

Berdasarkan hal tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2014 telah melakukan kegiatan analisis dan penataan data lahan pertanian yang dapat digunakan untuk :

- Menyediakan data lahan pertanian secara series dan terupdate.
- Melengkapi data dengan selain variabel-variabel

lahan sawah irigasi, non irigasi, lahan tegal/kebun, lahan ladang/huma, lahan sementara tidak diusahakan.

- Mengetahui sejauh mana keragaan lahan pertanian.

Untuk mendukung hal tersebut, maka telah diselenggarakan workshop "Penataan dan Analisis Data Lahan Pertanian Tahun 2014" yang bertujuan :

- Memaparkan keragaan perkembangan data lahan pertanian.
- Memaparkan hasil perhitungan kebutuhan lahan pertanian yang dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk.
- Memaparkan hasil pengumpulan data lahan berbasis peta yang telah dilakukan di 2 kabupaten contoh.

Workshop dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2014, di PPMKP Ciawi Bogor. Pada kesempatan tersebut Kepala Bidang Data Non Komoditas menyampaikan peranan data lahan pertanian dalam mendukung program revitalisasi pertanian yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Dalam mendapatkan data lahan yang akurat di informasikan bahwa ada beberapa kabupaten yang sangat konsen terhadap data lahan seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lumajang Jawa Tengah yang dalam melakukan pengumpulan data lahan sudah menggunakan data citra satelit yang diperoleh dari hasil pemetaan Pusdatin tahun 2010.



Narasumber dan Panitia Workshop Penataan dan Analisis Data Lahan Pertanian

Lanjutan Berita Workshop Penataan dan Analisis...

Jadwal Acara Workshop Penataan dan Analisis Data Lahan Pertanian Tahun 2014

Jam	MATERI	Narasumber	Moderator
08.30-08.45	Registrasi Peserta		
08.45-09.15	Pembukaan dan Pengarahan	Kabid Data Non Komoditas	
09.15-09.30	Rehat / Coffe Break		
09.30-10.00	Lahan Pertanian di Indonesia	BPS	Kabid Data Non Komoditas
10.00-11.00	Diskusi	BPS	
11.00-11.30	Perkembangan Lahan Pertanian dan Program Penataan Data Lahan	Ditjen. PSP	Kabid Data Non Komoditas
11.30-12.30	Diskusi	Ditjen. PSP	
12.30-13.30	ISOMA		
13.30-14.00	Perkembangan Lahan Pertanian dan Analisis Kebutuhan Lahan Sawah di Indonesia	Ade Supriyatna Pusdatin	K a s u b b i d Prasarana
14.00-15.00	Diskusi		
15.00-15.15	Rehat / Coffe Break		
15.15-15.45	Penataan Data Neraca Lahan Berbasis Peta Citra	Laelatul H Pusdatin	K a s u b b i d Prasarana
15.45-16.45	Diskusi		
16.45-17.00	Penutupan	Kabid. Data Non Komoditas	



Peserta Workshop Penataan dan Analisis Data Lahan Pertanian

Hasil Diskusi sebagai berikut :

• **Pertanyaan peserta dari PSEKP**

Jika kita mencermati kuesioner Podes dari BPS tahun 2010, ternyata tidak sama formatnya dengan Podes tahun 2008 sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan antara Podes 2008 dengan Podes 2010.

Apakah di BPS ada data tentang konversi lahan sawah ke lahan non sawah, lahan pertanian dan

lahan non pertanian?

Tanggapan dari BPS

Terkait Data Podes, dimana jawaban yang diperoleh tidak terukur sehingga sulit untuk dipercaya sehingga BPS tidak melakukan pengolahan dikarenakan kualitasnya yang sangat rendah.

Selama ini BPS belum memiliki data tentang konversi lahan, walaupun ada data lahan yang diperoleh dari SP - Lahan tetapi data tersebut tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk memperoleh konversi lahan.

Tanggapan dari Ditjen PSP

Jika memang ada data podes tentang data lahan itu sangat baik, sering kali data alih fungsi lahan yang digunakan hanya dikutip dari yang tidak jelas sumbernya.

Lanjutan Berita Workshop Penataan dan Analisis...



Peserta Workshop Penataan dan Analisis Data Lahan Pertanian

▪ Pertanyaan peserta dari BBSDLP

Data konversi lahan apakah dapat dimungkinkan diperoleh dari peta citra resolusi tinggi? Berdasarkan informasi yang ada bahwa alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sebesar 100 ribu ha per tahun. Dan hasil dari sensus pertanian menunjukkan bahwa rata - rata kepemilikan lahan bergeser dari hasil ST 2003 sebesar 0,3 ha per rumah tangga petani sedangkan hasil ST 2013 sebesar 0,77 ha per rumah tangga petani.

Bagaimana dasar perhitungan kebutuhan beras yang begitu tinggi pada tahun 2020 ke atas

Adakah insentif yang diberikan pemerintah bagi petani untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sawah ke lahan lain?

Tanggapan dari Ditjen PSP

Untuk menggunakan citra dalam menghitung alih fungsi lahan itu sangat sulit karena harus dilaksanakan sesuai pesanan sehingga biayanya sangat mahal.

Tanggapan dari Pusdatin

Dasar perhitungan diawali dari proyeksi jumlah penduduk, jika proyeksi jumlah penduduk naik maka kebutuhan terhadap konsumsi beras akan naik. Demikian juga kebutuhan lahan akan meningkat juga untuk memenuhi konsumsi beras. Akan tetapi jika tidak ada lagi lahan maka

pilihannya adalah menekan laju pertumbuhan penduduk atau menggalakkan diversifikasi pangan untuk mengurangi kebutuhan lahan dan kebutuhan konsumsi beras.

▪ Pertanyaan peserta dari Biro Perencanaan

Apakah mantri statistik dan mantri tani masih ada di kecamatan?

Alih fungsi lahan sebaiknya tidak menggunakan lahan sawah, seperti untuk jalan tol, hotel atau lainnya.

Tanggapan dari BPS

Istilah mantri statistik sudah diganti dengan koordinator statistik kecamatan (KSK). Keberadaan KSK masih ada di kecamatan walaupun sejak adanya perubahan kinerja BPS diharapkan KSK sebelum ke kecamatan harus melapor dahulu ke kantor kabupaten dimana seorang KSK bertanggungjawab 1 kecamatan.

Dalam melakukan pekerjaan pengumpulan dan pelaporan data, KSK selalu bekerja sama dengan mantri tani (KCD).

Tanggapan dari Ditjen. PSP

Untuk alih fungsi walaupun sudah ada UUD nya tetap saja tidak berjalan, karena ada yang ingin membantu kebutuhan petani. Ditambah dengan pembuatan RTRW tersangkut dengan alih fungsi lahan. Ada kalanya kepala daerah tidak berani untuk membuat Perda RTRW.



Peserta Workshop Penataan dan Analisis Data Lahan Pertanian

Lanjutan Berita Workshop Penataan dan Analisis...



Peserta Workshop Penataan dan Analisis Data Lahan Pertanian

Tanggapan dan masukan peserta dari Ditjen. Hortikultura

Bahwa sudah ada UU untuk perlindungan lahan pertanian tetap tidak berdaya dan tidak mampu menahan terjadi alih fungsi lahan.

Dalam rangka meningkatkan produksi cabe Dirjen Horti menyarankan untuk menanam cabe di musim kering. Untuk itu akan diberikan bantuan pompa air bagi petani dan menyarankan adanya penerapan metode menanam cabe dalam poliback.

Dan di informasikan bahwa tanggal 23 Des 2014 akan ada workshop di Ditjen Hortikultura dimana Pusdatin diharapkan dapat mempresentasikan tentang hasil analisis tentang tenaga kerja, pupuk dan alsin yang sudah menjadi satu kesatuan.

• Pertanyaan peserta dari Pusdatin

Apakah di dalam SP - Lahan sudah tercover untuk data lahan perkebunan dan jika ada, apakah Pusdatin dapat memperolehnya?

Apakah BPS sudah memperoleh batas administrasi kecamatan dari BIG?

Apakah Ditjen. PSP sudah melakukan audit jaringan irigasi dengan melakukan pemetaan jaringan irigasi, dimana irigasi yg rusak dan bagaimana menetapkan indikator tingkat kerusakan itu seperti apa? Karena selama ini mereka (PU) menggunakan DOP.

Tanggapan dari BPS

Data lahan perkebunan sudah tercover didalam formulir SP - lahan yaitu di lahan tegal/kebun.

Sampai saat ini BPS sedang menunggu dan belum mendapatkan batas administrasi dari BIG. Selama ini di dalam melakukan kegiatan di lapangan BPS selalu menggunakan sketsa yang dibuat oleh petugas KSK dan sketsa tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk batas administrasi kecamatan karena BPS tidak memiliki wewenang penentuan batas administrasi.

Tanggapan dari Ditjen. PSP

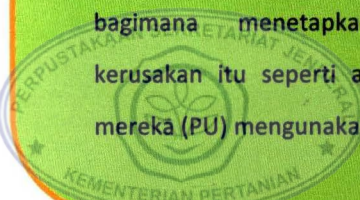
Ditjen. PSP selama ini sudah melakukan audit jaringan irigasi yang menggambarkan tingkat kerusakan irigasi dengan menggunakan peta citra satelit dari pusdatin untuk pulau Jawa. Data audit jaringan irigasi sudah diperoleh hingga tingkat kecamatan dan semuanya dilakukan oleh pihak ketiga.

Peserta workshop penataan dan analisis data lahan pertanian tahun 2014 berasal dari unit lingkup Kementerian Pertanian antara lain :

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
3. Direktorat Jenderal Hortikultura
4. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
6. Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian



Panitia Workshop Penataan dan Analisis Data Lahan Pertanian



Lanjutan Berita Workshop Penataan dan Analisis...

- | | |
|---|---|
| 7. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal | 10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian |
| 8. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal | 11. Badan Ketahanan Pangan |
| 9. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian | 12. Tim Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian |
- (s Ade)

WORKSHOP ANALISIS KESEJAHTERAAN PETANI 2014



Kapusdatin Membuka Workshop Analisis Kesejahteraan Petani 2014

Pertanian merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Salah satu empat sukses pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam membangun pertanian merupakan sarana bagi para pengambil keputusan di bidang pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam pembangunan pertanian selanjutnya didorong untuk mewujudkan kesejahteraan petani, termasuk menyediakan data dan informasi tentang kesejahteraan petani.

Selama ini tolak ukur kesejahteraan petani didekati dengan konsep Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan rasio antara indeks yang diterima petani (IT) dengan indeks yang dibayar petani (IB). Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani. Indikator lain yang digunakan Pusat Data dan Sistem Informasi

Pertanian (pusdatin) dalam menganalisis kesejahteraan petani disamping NTP adalah dengan menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang bersumber dari BPS dimana dari survei ini dihasilkan besarnya komponen pengeluaran makanan dan non makanan pada rumah tangga secara umum dan lebih spesifik pada rumah tangga pertanian.

Pusdatin pada tahun 2014 melaksanakan workshop analisis kesejahteraan petani, dengan tema "Kesejahteraan Petani Ditinjau dari Berbagai Kajian". Tujuan dari workshop ini antara lain memaparkan hasil analisis data kesejahteraan petani tahun 2014 yang telah dilakukan Pusdatin, memaparkan analisis sosial ekonomi petani hasil dari sensus pertanian 2013 dan mendapatkan masukan guna penyempurnaan analisis data kesejahteraan petani tahun berikutnya.

Workshop ini diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 5 Desember 2014 bertempat di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI), Depok. Peserta workshop Analisis Kesejahteraan Petani tahun 2014 terdiri dari 37 peserta, yang berasal dari unit lingkup Kementerian Pertanian, Pusdatin dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan perwakilan dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura,

Lanjutan Berita Workshop Analisis Kesejahteraan Petani...



Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (BKP), Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP), Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik, Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat (Sekretariat Jenderal), Kepala Bidang Data Komoditas, Pusdatin dan tim Penyusunan Analisis Kesejahteraan Petani, Direktorat Kesejahteraan Rakyat - BPS.

Pembukaan workshop ini disampaikan oleh Bapak Kapusdatin (Ir. M. Tassim Billah, M.Sc.). Dalam pembukaannya menyampaikan bahwa banyak indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan petani, sementara selama ini kesejahteraan petani dihitung menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP). Bapak Kapusdatin masih meragukan penilaian kesejahteraan melalui NTP, karena hanya memperhitungkan perubahan harga, tanpa melibatkan perubahan besaran produksi. Target pembangunan pertanian seharusnya bukan hanya swasembada, namun lebih dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan petani. Dalam

Renstra Kementerian Pertanian, Bapak Kapusdatin menyarankan untuk banyak memasukkan indikator kesejahteraan petani, dilihat dari pencapaian PDB per kapita, Susenas, dan hasil ST - 2013.

Workshop Analisis Kesejahteraan Petani ini dibagi tiga Sesi, sesi pertama adalah penyampaian hasil analisis kesejahteraan petani berdasarkan data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Nilai Tukar Petani (NTP) oleh Pusdatin. Pada sesi ini disampaikan bahwa dari hasil Susenas, BPS tahun 2011 – 2013 menunjukkan Rata - rata persentase rumah tangga pertanian sebesar 28% dan rumah tangga non pertanian sebesar 72% dari total rumah tangga Indonesia dan Persentase rumah tangga pertanian didominasi oleh rumah tangga pertanian sub sektor tanaman pangan mencapai 60%. Pola pengeluaran rumah tangga pertanian berdasarkan hasil Susenas, secara umum persentase pengeluaran untuk makanan masih mendominasi pola pengeluaran rumah tangga pertanian di Indonesia. Jika dilihat nilai absolutnya, rata - rata per kapita dalam sebulan pengeluaran RTP total (makanan dan non makanan) di Indonesia tahun 2013 adalah Rp.515.275,- sementara garis kemiskinan sebesar Rp.271.630. Hal ini menunjukkan dari rata - rata pengeluaran rumah tangga pertanian lebih dari 2 kali lipat dari garis kemiskinan. Angka NTP nasional gabungan selama periode tahun 2011 – 2013 selalu berada diatas nilai 100, menunjukkan bahwa



**Peserta Workshop
Analisis Kesejahteraan Petani 2014**

Lanjutan Berita Workshop Analisis Kesejahteraan Petani...



**Workshop Analisis Kesejahteraan
Petani 2014**

pendapatan petani naik lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Dengan asumsi volume produksi petani sama, maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan petani pada periode tersebut meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2007.

Pada sesi yang ke-2 adalah paparan dari BPS yang disampaikan oleh ibu Harmawanti Marhaeni, M. Sc. Paparan ini merupakan hasil analisis dari Survei Pendapatan Petani hasil ST-2013. Telah dipaparkan bahwa Kesejahteraan petani masih rendah dinilai dari pencapaian NTP dan stabil pada angka 104, pendapatan riil petani menurun dan lebih dari 50% penduduk miskin di pedesaan bekerja di sektor pertanian. Dari hasil survei pendapatan petani, persentase yang cukup besar mempekerjakan pekerja anak dan pekerja rumah tangga. Indikator yang dapat dihitung dari data dasar hasil ST tersebut adalah; Determinan pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian, Indeks Kemiskinan Multidimensi yaitu sebesar 14% masih berada di bawah garis kemiskinan karena dari akses pendidikan dan kesehatan kurang dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yaitu seberapa tahan RTP terhadap pangan. Hasilnya → sebagian besar cukup tahan, hal ini karena sebagian besar merupakan petani tanaman pangan.

Pada sesi terakhir telah disampaikan oleh Prof. Dr. Pantjar Simatupang dengan pemaparan

“Pengembangan Indikator Kesejahteraan Petani”.

Sesi ini merupakan pembahasan dari dua sesi sebelumnya. Dalam menghitung Kesejahteraan yang menggunakan pendapatan per kapita disarankan untuk disajikan nominal dan riil juga dengan mempertimbangkan apa yang akan digunakan sebagai deflatornya. Pangsa pengeluaran makanan disarankan untuk diuraikan konsumsi menurut karbohidrat, lemak dan protein sesuai Bennett's Law (Jika suatu penduduk makin kaya, maka mereka akan mengurangi konsumsi karbohidrat/ umbi - umbian dan beralih ke makanan yang mengandung protein). Untuk menuju pengembangan indikator kesejahteraan petani maka disarankan untuk berbagai perbaikan. Nilai Tukar faktor lebih sesuai karena menghitung HDI petani. Perbaikan untuk Pusdatin dalam menyajikan data sebaiknya Indikator yang lebih tepat ialah pendapatan riil, sementara yang disajikan pendapatan nominal. Untuk perhitungan kesejahteraan menggunakan data NTP perlu ditambahkan rincian tabel untuk komponen indeks yang diterima petani (it) dan indeks yang dibayar petani (ib).

Setelah dari masing-masing pemaparan yang dilakukan oleh narasumber telah dilakukan sesi tanya jawab guna mendapatkan masukan dari peserta. Kesimpulan dari hasil workshop ini adalah analisis kesejahteraan petani yang telah dilakukan



**Workshop Analisis Kesejahteraan
Petani 2014**

Lanjutan Berita Workshop Analisis Kesejahteraan Petani...

Pusdatin disarankan bisa saling melengkapi antara Pusdatin dan BPS. Dengan melihat analisis yang telah dilakukan oleh BPS terhadap hasil Survei Pendapatan Petani 2013, Pusdatin diharapkan dapat membuat analisis untuk menghasilkan indikator kemiskinan (Model determinan Pendapatan RTP dan Indeks Kemiskinan Multidimensi) berdasarkan data dasar Susenas. (Sri Wahyuningsih)

EVALUASI TRIWULAN IV PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN



Evaluasi Triwulan IV
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Pada tanggal 22 s/d 23 Desember 2014 diadakan Evaluasi kegiatan Satker Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian. Hadir dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan Kabid/Kabag, Kasubbid/Kasubbag, Koordinator Fungsional Statistisi dan Koordinator pranata Komputer, PJT dan Staf lingkup Perencanaan dan Keuangan acara dibuka oleh Kabag Umum mewakili Kapusdatin yang sedang menghadiri rapim di Kementerian Pertanian serta narasumber untuk kegiatan Upaya Percepatan Data Tanaman Pangan pada Skala Nasional dari Ditjen Tanaman Pangan Bp Chairul Umam dan DR.

Heppy Suharyono (Direktur Tanaman Pangan dan Perkebunan BPS) yang diundang pada acara tersebut namun tidak dapat hadir karena kesibukan di instansi masing - masing.

Hasil yang telah dicapai sampai dengan 19 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

- **Anggaran**

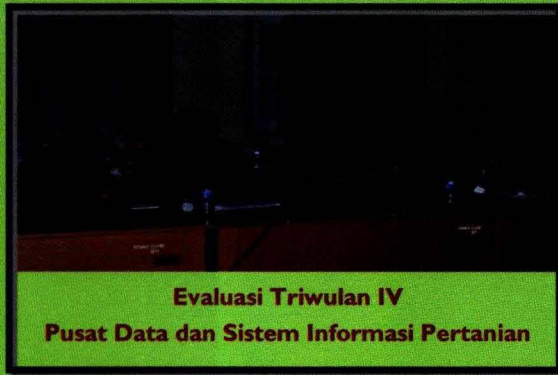
Pada Tahun Anggaran 2014 satker Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mengelola Anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 52.254.700.000,- (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan adanya kebijakan berupa penghematan Pagu anggaran Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian menjadi Rp. 47.590.976.000,- (Empat puluh tujuh milyar Lima ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan perincian seperti tersebut pada tabel realisasi anggaran per belanja s/d tanggal 19 Desember 2014 sbb :

REALISASI ANGGARAN TA.2014 PER BELANJA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN PER 19 DESEMBER 2014

NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH PAGU	PENTERAPAN DATA				SISA	
			TARGET		REALISASI		RP.	(%)
			RP.	(%)	RP.	(%)		
TOTAL PUSDATIN		47.590.976.000	47.590.976.000	100,00	41.244.386.539	86,66	6.346.589.461	13,34
1	Belanja Pegawai	6.848.239.000	6.848.239.000	100,00	6.538.802.201	95,48	309.436.799	4,52
2	Belanja Barang	36.006.282.000	36.006.282.000	100,00	31.394.631.738	87,19	4.611.650.262	12,81
3	Belanja Modal	4.736.455.000	4.736.455.000	100,00	3.310.952.600	69,90	1.425.502.400	30,10

Lanjutan Berita Evaluasi Triwulan IV Pusdatin...



Dilihat dari tabel diatas penyerapan anggaran per 19 Desember 2014 dari target Rp.47.590.976.000,- atau sama dengan 100% telah terealisasi sebesar Rp.41.244.386.539,- atau sama dengan 86,66% dengan sisa anggaran sebesar Rp.6.3463589.461,- sama dengan 13,34%.

Secara umum kegiatan - kegiatan yang di laksanakan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2014 pada Triwulan IV sampai dengan 19 Desember 2014 dari segi fisik output sebesar 100 % sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 telah terealisasi berupa progress pekerjaan sebesar 95% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam ROK, adapun rata - rata kegiatan yang belum dilaksanakan adalah penyusunan laporan akhir.

Hasil dari pelaksanaan evaluasi merupakan rekomendasi dari beberapa kesepakatan maupun perbaikan yang perlu ditindaklanjuti dan sebagai acuan untuk perbaikan perencanaan kedepan.

Adapun beberapa permasalahan yang menjadi perhatian diantaranya :

- Kegiatan Upaya Percepatan Data Tanaman Pangan untuk daerah pemekaran belum ada petugas KCD karena batas wilayah administratifnya belum jelas sehingga data TP tidak ada yang masuk, hal ini terjadi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur sedangkan berdasarkan arahan UKP4 salah satu perbaikan di hulu yang perlu direalisasikan

antara lain -pengangkatan petugas KCD dan ini belum terlaksana.

- Beberapa orang pejabat Statistisi dan Pranata Komputer tidak tertib administrasi sehingga telah melampaui batas kenaikan pangkat karena tidak mengajukan PAK akibatnya harus mengembalikan kelebihan tunjangan kinerja yang sudah diterima dan diberhentikan sementara/diberhentikan dari jabatan fungsional
- Perlu perencanaan kepegawaian karena banyak pejabat statistisi ahli dibanding dengan pejabat statistisi terampil sedangkan pekerjaan yang tersedia sebagian besar untuk statistisi terampil.
- *Content* di web Kementerian Pertanian untuk update data bukan merupakan tanggungjawab Pusdatin tetapi tanggungjawab instansi masing-masing untuk itu anggota pokja web harus ikut aktif update data.
- Data lahan sumber datanya bermacam - macam dengan format yang bermacam - macam untuk memudahkan penyimpanan data kedalam database format akan diseragamkan dalam bentuk excel.
- Data alsin dan produktivitas padi per kabupaten belum tersedia sehingga kalau bisa pengumpulan data alsin dan produktivitas padi masuk dalam form SP Upaya Percepatan Data Tanaman Pangan Pada Skala Nasional 2015 karena masuk dalam prioritas mendukung swasembada padi, jagung, kedele. Untuk itu perlu dibuatkan draft MOU antara Kemtan dan BPS untuk pengumpulan datanya.
- Knowledge Management berbagi dokumen masing - masing user yang mengupload dokumen securitynya bisa dirubah oleh masing-masing, untuk KM agar dikembangkan lagi proteksi datanya, orang yang mengcopy datanya bisa editing. (Wiwiek)

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN
PROMOSIAN HASIL PERTANIAN
DIRIPASDOM
LEMBAR DISPOSISI

Rahasia	Penting	Rutin
Indeks : 49646		Tanggal diterima : 17 Maret 2015
Kode :		
Perihal Surat Perintah Tugas		
No Surat : 213/KP.340/G/3/2015		Tanggal Surat 17 Maret 2015
Asal Surat : Direktorat PPIIP		Lampiran
INSTRUKSI / INIORMASI		DI TERUSKAN KEPADA
Untuk diketahui / dipergunakan seperlunya Untuk diselesaikan / diproses Minta saran / pertimbangan Untuk dibicarakan dengan saya Harap mewakili saya Untuk dipelajari Siapkan bahan Untuk di file Koordinasikan/diskusikan		Direktur Jenderal PPIIP Sekretaris Direktorat Jenderal Direktur Pengolahan Hasil Pertanian Direktur Mutu dan Standardisasi Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Direktur Pemasaran Domestik Kepala Subbag Tata Usaha Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Subdit Informasi Pasar Kepala Subdit Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga Kepala Subdit Sarana dan Kelembagaan Pasar Kepala Subdit Jaringan Pemasaran Direktur Pemasaran Internasional
Lainnya :		Lainnya :

Sesudah dipergunakan harap segera dikembalikan

8/23/3



18/03/2015 10:37



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NO.3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550 KOTAK POS 83/1200/KBYPM
TELEPON : 021-7816186.7815880.7815881.7816382.7816383.7816183.7815480 FAKSIMILE: 021-7816186.7816184
Website : <http://pphp.deptan.go.id/>

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 213 / KP. 340 / G / 03 / 2015

Dasar : Bahwa dalam rangka memberikan arahan pada acara Pertemuan Optimalisasi Pelayanan Informasi Pasar pada tanggal 18 Maret 2015 di Makassar Sulawesi Selatan, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusni Emilia Harahap
NIP : 19590322 198306 2 001
Jabatan : Direktur Jenderal pengolahan dan Pemasaran Hasil pertanian

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : Ir. Jamil Musanif
NIP : 19560331 198201 1 001
Jabatan : Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Plh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian disamping tugas jabatannya sendiri pada tanggal tersebut diatas
2. Hal-hal yang prinsip akan dikonsultasikan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Demikian surat tugas ini dibuat, agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 2015

Direktur Jenderal,



Yusni Emilia Harahap
Yusni Emilia Harahap
19590322 198306 2 001

Tembusan :

1. Eselon II lingkup Ditjen PPHP
2. Yang bersangkutan





KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN



GD. D LANTAI IV - JL. HARSONO RM NO. 3 RAGUNAN - JAKARTA SELATAN 12550
TELEPON : (021) 7822638, 7816384, FAKSIMILE (021) 7822638, 7816385
HOMEPAGE: <http://www.pertanian.go.id> - Email : pusdatin@pertanian.go.id

Nomor : 182/HM.120/A.7/3/2015
Lampiran : 2 (dua) eksplar
Perihal : **Publikasi Pertanian**

20 Maret 2015

Yth. :
(mohon lihat lampiran)
di-
tempat

Bersama ini kami sampaikan publikasi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian berupa Newsletter Vol.12 No.120 bulan Januari dan No.121 bulan Februari Tahun 2015, semoga publikasi tersebut dapat dimanfaatkan dan disebarakan ke instansi yang memerlukannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data
dan Sistem Informasi Pertanian

M. Tassim Billah
NIP. 19570725 198203 1 002

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (sebagai laporan)



	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
1	Direktur Jenderal Hortikultura
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
3	Direktur Perbenihan Hortikultura
4	Direktur Budidaya dan Pasca Panen Buah
5	Direktur Budidaya dan Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat
6	Direktur Budidaya dan Pasca Panen Florikultura
7	Direktur Perlindungan Hortikultura
	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Direktur Perbibitan Ternak
4	Direktur Pakan Ternak
5	Direktur Budidaya Ternak
6	Direktur Kesehatan Hewan
7	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen
	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
1	Direktur Jenderal Perkebunan
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan
3	Direktur Budidaya Tanaman Tahunan
4	Direktur Pasca Panen dan Pembinaan Usaha
5	Direktur Perlindungan Perkebunan
6	Direktur Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar
7	Direktur Tanaman Semusim
	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
1	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
3	Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan
4	Direktur Pengelolaan Air Irigasi
5	Direktur Pembiayaan Pertanian
6	Direktur Pupuk dan Pestisida
7	Direktur Alat dan Mesin Pertanian
	DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
1	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
3	Direktur Mutu dan Standardisasi
4	Direktur Pengolahan Hasil Pertanian
5	Direktur Pemasaran Domestik
6	Direktur Pemasaran Internasional
7	Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi

